

**KETERKAITAN ANTARA DEMOKRATISASI  
DAN KONFLIK ETNIS**  
(Studi Perbandingan Terhadap Keterkaitan Demokratisasi dan  
Konflik Etnis antara Kasus Uni Sovyet [1985-1991] dan  
Indonesia [1998-awal 2001])

**SKRIPSI**



Oleh :

**Mohamad Burhanudin**

**NIM : 079615316**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
SEMESTER GENAP TH. 2000/2001**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Setuju untuk diujikan, Surabaya, 14 Juni 2001



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada  
Hari Kamis, tanggal 14 Juni 2001

Panitia Penguji,

Ketua,



Drs. I Basis Susilo, MA  
NIP. 130 937 977

Anggota,



Dra. Lilik Salamah, M.Si.  
NIP. 131 569 504

Anggota,



Dra. Suharyatie Hidayat, MA  
NIP. 130 531 812

## ABSTRAKSI

Gelombang demokratisasi ketiga—seperti yang digambarkan oleh seorang ilmuwan politik **Samuel P. Huntington**, dalam bukunya yang berjudul *The Third Wave of Democratization in the Late Twentieth Century*—telah berdampak luas terhadap semakin menyebarnya ide-ide dan pandangan demokrasi ke hampir dua pertiga belahan dunia. Meluasnya efek gelombang demokratisasi pada penghujung abad ke dua puluh ini semakin mendapat justifikasi yang signifikan dengan berakhirnya Perang Dingin. Dalam hal ini, arti penting bagi demokratisasi adalah bahwa dominasinya sebagai ideologi besar dunia semakin tidak tertandingi, setelah ideologi komunis yang bertahun-tahun eksis sebagai “lawannya” telah runtuh seiring dengan pecahnya “sang patron”, yaitu Uni Soviet.

Namun, ironisnya di beberapa negara yang mengalami demokratisasi tersebut, muncul fenomena yaitu, terjerembabnya negara-negara tersebut ke dalam konflik etnis. Kecenderungan ini juga dikemukakan oleh **Jack Snyder**, ilmuwan politik dari Coloumbia University, melalui penelitiannya yang menemukan bahwa semua konflik etnis yang penuh kekerasan selama dasawarsa 1990-an terjadi di negara yang baru mengalami kebebasan politik, dan perlindungan hak-hak sipil, dan kebebasan pers (baca: demokratisasi).

Di antara banyak negara yang mengalami demokratisasi di satu sisi dan konflik etnis konflik etnis di sisi lain adalah Uni Soviet dan Indonesia. Seperti kita ketahui, bahwa sejak Gorbachev berkuasa di Uni Soviet, dia mulai merambah jalan reformasi melalui tiga *icon* pembaruannya yaitu, *perestroika*, *glasnost*, dan *demokratizatsiya*. Ketiganya mengarah kepada suatu upaya untuk merestrukturisasi dan demokratisasi di uni Soviet. Namun, kenyataan ternyata tidak seindah harapan. Sejak bergulirnya demokratisasi di Uni Soviet, persoalan-persoalan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Soviet muncul, di mana persoalan tersebut belum pernah terjadi dalam era sebelumnya. Di antara persoalan-persoalan tersebut yang paling pelik adalah munculnya konflik etnis yang kemudian mengarah kepada gejala etno-nasionalisme. Konflik etnis tersebut berlangsung baik secara vertikal (contoh: separatisme di Republik Estonia dan Irredentisme di Republik Moldova) maupun horisontal (contoh: pertikaian antara etnis Akhbazia dan etnis Georgia, dan pertikaian antara etnis Moldova dengan etnis *Russophone*), hingga kemudian Soviet pecah berkeping-keping.

Kondisi hampir serupa juga dialami oleh Indonesia. Seiring dengan runtuhnya rezim otoriter Soeharto, maka koridor demokratisasi di Indonesia terbuka. Kebebasan pers, kebebasan berserikat, sistem multipartai, desakralisasi lembaga kepresidenan, pemilu yang relatif jujur, dan kebebasan berpendapat, menandai era baru tersebut. Namun, setelah Soeharto *lengser*, rezim-rezim transisi demokrasi mengalami persoalan-persoalan baru yang berupa ketidakpastian-ketidakpastian dalam kehidupan bernegara, seperti krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis sosial. Di antara persoalan-persoalan tersebut yang paling mengkhawatirkan adalah adanya ancaman disintegrasi bangsa, yang datang dari timbulnya berbagai konflik etnis di berbagai tempat di Indonesia, seperti, di Aceh, Papua, Sambas, Sampit, Poso, dan lain sebagainya. Sehingga pada dasarnya,

penelitian ini ingin menjawab persoalan mengapa konflik etnis muncul justru tatkala demokratisasi sedang terjadi di Uni Soviet dan Indonesia?

Dengan merujuk pada pendapat ilmuwan-ilmuwan seperti, **Jack Snyder**, **Carol Skalnikk Leff**, dan **Jack Haedner**, penelitian ini setidaknya telah mengidentifikasi lima hal yang berhubungan dengan keterkaitan antara fenomena demokratisasi dan konflik etnis, khususnya di Indonesia dan Uni Soviet, yaitu: konstruksi kontemporer kebangsaan yang rentan terhadap benturan-benturan dan perubahan, meningkatnya partisipasi politik massa yang mengarah kepada partisipasi komunal yang berbasis pada identitas etnis, adanya peran elit politik yang mengipas sentimen etnis, terpuruknya pranata-pranata sosial dalam era demokratisasi, dan adanya ketidakpastian-ketidakpastian dalam era demokratisasi yang menurunkan legitimasi pemerintah pusat di mata rakyat, khususnya di mata entitas etnis tertentu.

Penelitian ini, juga menyimpulkan bahwa keterkaitan antara demokratisasi dan konflik etnis baik di Uni Soviet maupun di Indonesia berbentuk katalisator. Dalam arti bahwa demokratisasi telah mengatalisasi *intervening variable*, sehingga memunculkan konflik etnis. Penelitian ini mungkin jauh dari sempurna, oleh karena itu untuk mengetahui lebih dalam silahkan simak penelitian ini.

Kata Kunci : Demokrasi, Demokratisasi, dan Konflik Etnis